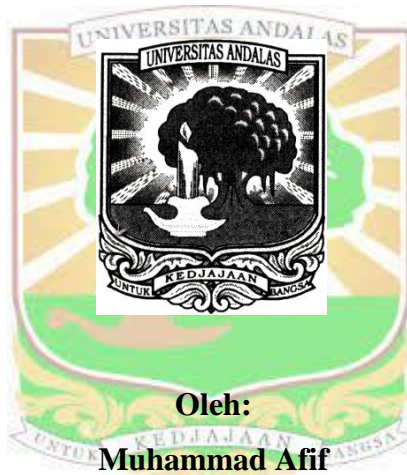


**KEDUDUKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU PADA PERTIMBANGAN
HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS
TANAH ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA**

DISERTASI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum**



**Oleh:
Muhammad Afif**

NIM: 1630112003

Tim Promotor:

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.,M.PA.

Dr. Yuslim, S.H.,M.H.

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2021

ABSTRAK

Di Sumatera Barat, terdapat beberapa tanah yang didaftarkan, diadministrasikan, dan diterbitkan sertipikat hak milik atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota masih teridentifikasi sebagai tanah ulayat berdasarkan hukum adat Minangkabau. Kondisi ini mengakibatkan sengketa antara individu dan/atau Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sengketa ini terjadi karena adanya kepentingan yang dirugikan atas objek yang sama dan juga terdapat dua sistem aturan (hukum) yang digunakan oleh dua pihak yang bersengketa. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui jalur penyelesaian non litigasi (diluar pengadilan) maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu pertama, mengidentifikasi implikasi hukum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terhadap Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Kedua, mengetahui kedudukan Hukum Adat Minangkabau pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadap penyelesaian sengketa Sertipikat Hak Milik atas Tanah antara Masyarakat Hukum Adat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Ketiga, mengetahui konsep kedudukan Hukum Adat Minangkabau yang ideal di masa mendatang pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadap penyelesaian sengketa Sertipikat Hak Milik atas Tanah antara Masyarakat Hukum Adat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Menurut sifat, penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis *ratio decidendi* atau alasan-alasan yang dipertimbangkan hakim dalam membuat keputusan dengan memperhatikan fakta formil dan fakta materiil. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, terdapat implikasi hukum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang didaftarkan/dialihkan oleh orang atau beberapa orang yang bukan merupakan anggota masyarakat hukum adat Minangkabau yang kemudian merugikan kepentingan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Kedua, kedudukan atau keberadaan hukum adat pada pertimbangan hukum putusan menentukan dipenuhinya unsur-unsur keadilan (filosofis), kemanfaatan (sosiologis) dan kepastian hukum (yuridis) dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah. Terdapat pengaruh signifikan pemenuhan unsur-unsur tujuan hukum pada kualitas putusan yang menerapkan Hukum Adat Minangkabau. Ketiga, konsep-konsep ideal kedudukan Hukum Adat Minangkabau di masa mendatang pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang antara lain dengan menerapkan Hukum Adat Minangkabau tanpa mengecualikan Hukum Negara, mengedepankan keadilan substantif. Selain itu, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum adat dan mempertimbangkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan di masyarakat.

Kata kunci: Hukum Adat Minangkabau, Sengketa Hak Milik atas Tanah, Pengadilan Tata Usaha Negara.

ABSTRACT

In West Sumatera, there are numbers of lands that have been administered based on customary law are also have been registered, administered, and issued the respective certificates by the Head of National Land Agency. This condition has created disputes between individual interests and/or customary law communities and the Head of National Land Agency. The dispute is occurred because of conflicted interest on the same objects and also there are two law systems applied by two disputed parties. When the conflict cannot be resolved through non litigation path, disputing individuals may resolve the case in litigation path in Padang administrative court. This research is firstly aimed to identify legal consequences over certificates of ownership right that are issued by the Head of Land Agency to customary law communities. Secondly, this dissertation is conducted to examine the legal status of Minangkabau customary law in administration court's judgment in the context of dispute resolution over the right certificate ownership between customary law communities and the Head of Land Agency. Thirdly, this work is done to re-enforce the ideal concept of Minangkabau customary law legal status on legal consideration in dispute resolution over ownership land right between customary law communities and the Head of Land Agency in the future. According to the nature of the study, the research is classified as normative legal research that focuses on case approach through analyzing ratio decidendi or the reasons considered by the judge in making decisions with regard to formal facts and material facts. This study concludes that first, there are legal consequences over the ownership right certificate between the Head of Land Agency and the Minangkabau Customary Law Society in Padang State Administrative Court, in that there are ownership right certificates issued for the same location with High Heritage Assets area that occurred over plaintiff interest that had been lost in the dispute. Second, the implementation of customary law in legal judgments affects the fulfillment of the elements of justice as the philosophical aspect, utilities as the sociological aspect, and law certainty as the juridical aspect in implementing customary law in ownership right conflict resolution. The influence of Minangkabau customary law implementation is significant in accepted judgments. Third, ideal future concepts in Minangkabau customary law legal status on legal consideration in Padang State Administrative Court's court ruling will be about the application of Minangkabau customary law without subdising state law, fostering substantive justice in order. Moreover, a judge is also obliged to exercise customary law values and to consider facts dan realities in communities.

Keywords: Minangkabau Customary Law, Disputes on Land Ownership Right, Administrative Court